



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JEBAKU>

Halaman UTAMA: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>



Arah Penataan dan Pengembangan Konsep *Waterfront City* Pada Objek Wisata Pantai Soge Pacitan

Iqbal Abdul Aziz Zain¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Ilmu Ekonomi

Email: iqbal161100@gmail.com*

Abstract

Soge Beach is a tourist attraction that has many tourist attractions. However, the use of space in it is still not structured and neatly arranged. This causes a decrease in tourist attraction, the quality of natural resources and the existing ecosystem. The concept of a waterfront city is a concept of structuring a waterfront area that emphasizes the principle of sustainability. The purpose of this study is to provide an overview of the direction of the arrangement and development of the waterfront city concept at the Soge Pacitan Beach tourist attraction. The research method used is a qualitative descriptive method to explain, explain, describe, describe, and answer the problems at Soge Beach in more detail. The results obtained are the spatial arrangement of the Soge Beach waterfront directed at land use, building planning, circulation and parking, open space, pedestrian paths, supporting activities, marking and preservation and conservation. As for the development of the waterfront, it is directed towards infrastructure, architecture, facilities and tourism activities. With these results, it is hoped that it will have an impact on the new face of the Soge Beach tourism object so that it can encourage rapid economic growth.

Keywords: Arrangement, Development, Waterfront, Tourism Object.

Abstrak

Pantai Soge merupakan objek wisata yang memiliki banyak dari tarik wisata. Namun, pemanfaatan ruang di dalamnya masih belum terstruktur dan tertata rapi. Sehingga menyebabkan turunnya daya tarik wisata, kualitas sumber daya alam dan ekosistem yang ada. Konsep waterfront city merupakan konsep penataan kawasan terpijan air yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan arah penataan dan pengembangan konsep waterfront city pada objek wisata Pantai Soge Pacitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deksriptif kualitatif untuk menerangkan, menjelaskan, menggambarkan, melukiskan, dan menjawab permasalahan di Pantai Soge secara lebih rinci. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penataan ruang *waterfront* Pantai Soge diarahkan pada tata guna lahan dan bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, penandaan serta preservasi dan konservasi. Sedangkan untuk pengembangan *waterfront*, diarahkan infrastruktur, arsitektur, fasilitas dan aktivitas wisata. Dengan hasil tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak bagi wajah baru ovjek wisata Pantai Soge sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

Kata kunci: Penataan, Pengembangan, Waterfront, Objek Wisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, baik dalam hal pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengaktifkan kinerja sektor lain. Perencanaan sektor pariwisata berdasarkan prinsip berkelanjutan (*suistanable*) merupakan tugas penting bagi masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kawasan wisata secara ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan serta dimanfaatkan sumber daya alamnya demi terwujud kesejahteraan masyarakat. Perencanaan sektor pariwisata memiliki tingkatan pelaksanaan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal terendah. Setiap tingkatan tersebut berfokus pada berbagai aspek

pertimbangan dan variable yang berbeda serta bersifat komprehensif.

Pengembangan kawasan dengan konsep *waterfront city* merupakan salah satu solusi perencanaan pembangunan sektor pariwisata. Secara bahasa, *waterfront* diartikan sebagai area tepian air. Semua kawasan yang menjadi batas antara daratan dan wilayah perairan (laut, sungai, danau) dapat disebut sebagai *waterfront*. Konsep *waterfront city* telah lama diterapkan di berbagai negara, sebagai bagian dari wilayah yang dicirikan berbatasan dengan air, baik laut, sungai, maupun danau. (Echols dalam Munandar, 2013). Konsep *waterfront city* merupakan alternative pengembangan kawasan tepian air, sebagai upaya menciptakan kawasan yang tertata, memiliki kualitas lingkungan yang baik dan menjadi penopang kegiatan perekonomian. Pengembangan kawasan dengan konsep *waterfront city* merupakan investasi yang besar serta menjadi alternative penataan wilayah secara menyeluruh. Pembangunan daerah pesisir secara berkelanjutan menjadi alternatif kebijakan penataan dan pengembangan tata ruang wilayah bagi pemerintah.

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni sepanjang 91.181 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Garis pantai yang panjang mengakibatkan kota-kota di Indonesia sebagian besar berada di tepi air. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 menjelaskan bahwa sebanyak 216 kota andalan di Indonesia berada di tepi laut (pantai), sungai atau danau (PP No. 47 Tahun 1997, n.d.). Pertumbuhan wilayah tepi air terutama pantai relative lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Hal ini dikarenakan letak geografisnya berada di daerah endapan yang subur dan memiliki mobilitas yang lebih mudah. Pertumbuhan yang cepat ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, pelabuhan, tambak, dan objek wisata. Selain itu, pemanfaatan ruang tepi pantai sering kali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini kemudian menyebabkan wilayah tepian air kehilangan potensi unggulannya karena pemanfaatan ruang yang tidak efektif. Padahal, RTRW bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang bersinergi, efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta dijadikan acuan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal akan keindahan pantainya, karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Salah satu pantai yang terkenal di Kabupaten Pacitan adalah Pantai Soge yang terletak di Dusun Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan yang berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota. Pantai Soge memiliki luas 15, 643 ha dengan pasir putih, ombak sedang, pepohonan cemara yang rindang serta berada tepat di tepi Jalur Lintas Selatan (JLS). Letaknya tersebut mengakibatkan kawasan Pantai Soge menjadi salah satu kawasan wisata yang ramai di Kabupaten Pacitan karena akses transportasinya yang mudah. Saat ini, Pantai Soge sedang dalam tahap pengembangan yang ditandai dengan mulai dibangunnya SPBU, infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Namun dalam prosesnya, pemanfaatan ruang yang ada di Pantai

Soge masih belum terstruktur dan tertata rapi. Hal ini dapat dilihat dari masih bercampurnya antara kawasan tambak, kawasan objek wisata dan pemukiman. Pertumbuhan bangunan yang tidak terkendali juga menyebabkan pengaruh negative bagi tata ruang di Pantai Soge yang pada akhirnya merusak potensi wisata yang ada. Rata-rata bangunan berbentuk gubuk-gubuk yang difungsikan sebagai warung dan pemukiman baik oleh masyarakat sekitar maupun pendatang. Selain itu, masih banyak lahan kosong yang hanya dimanfaatkan sebagai area parkir karena dirasa lebih menguntungkan. Aktivitas tersebut tentunya dapat menurunkan kualitas sumber daya alam dan ekosistem yang ada di Pantai Soge.

Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kawasan pantai merupakan daerah konservasi sumber daya yang harus dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan secara berkelanjutan (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2008). Penataan kawasan Pantai Soge perlu dilakukan dengan menerapkan strategi perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna memaksimalkan potensi dan keunikannya, baik yang sudah ada ataupun belum. Tak hanya itu, penataan kawasan juga bermaksud untuk mengembalikan fungsi awalnya, termasuk sebagai zona penanggulangan bencana dan konservasi sumber daya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata

Wisata adalah aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi suatu tempat, dengan tujuan berekreasi, mengembangkan diri, serta mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah. (*UU Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, 2009). Tujuan pariwisata adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta melestarikan alam, lingkungan dan kebudayaan. Sektor pariwisata merupakan jenis industri yang majemuk karena memiliki rantai ikatan yang kuat dengan berbagai aspek pembangunan.

Pariwisata memberikan dampak ke semua lini aset negara. Sebagai industri, pariwisata akan meningkatkan penerimaan devisa yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Penerimaan devisa lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang membutuhkan waktu relative lebih lama. Pariwisata termasuk jenis *invisible export* (ekspor tidak nyata) karena tidak ada barang atau komoditi yang dikirim ke luar negeri (Andrasmo, 2018). Menurut Bennet, keberhasilan pariwisata tidak hanya bersifat *top down* namun juga *bottom up*. Artinya pariwisata tidak hanya bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan, namun lebih diarahkan pada pengembangan peluang-peluang usaha yang ada di masyarakat agar maju dan berkembang (Conoras, 2016).

Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas objek wisata. Pengembangan pariwisata merupakan wujud intergrasi dan kepaduan sumber daya

pariwisata dengan aspek-aspek diluar pariwisata. Adanya pengembangan pariwisata diharapkan sebuah objek wisata mampu lebih baik dan lebih menarik dari segi tata ruang kawasan maupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya (Wiriantari, 2021). Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perolehan devisa serta diharapkan menjadi *agent of development* sehingga mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan daerah di sekitarnya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata secara professional tidak dapat lepas dari partisipasi pemerintah, masyarakat dan swasta. Partisipasi pemerintah lebih diarahkan pada kebijakan atau tata aturan, sedangkan partisipasi masyarakat dan swasta lebih diarahkan pada kegiatan pembinaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata antara lain (Conoras, 2016) :

1. Penataan, pemeliharaan dan pelestarian objek wisata
2. Pemasaran objek wisata (promosi)
3. Pembinaan produk wisata dan produk pendukung lainnya
4. Penyusunan kebijakan Rencana dan Pembangunan Pariwisata Daerah
5. Pembinaan masyarakat mengenai kepariwisataan

Waterfront City

Konsep *waterfront city* pertama kali diterapkan pada abad ke-19 oleh James Rouse untuk merevitalisasi kawasan industri di kawasan pesisir San Fransisco, Boston, Amerika Serikat. *Waterfront* secara bahasa berarti daerah tepi laut atau bagian daratan yang berbatasan dengan air (Munandar, 2013). Umumnya *waterfront* terdapat di pelabuhan sebagai pusat kesibukan lalu lintas perdagangan dengan sarana transportasi seperti kapal, perahu dan boat. Menurut Malone (1996), *Waterfront City* adalah area yang berada di perbatasan daratan dan perairan dimana didalamnya terdapat beragam kegiatan seperti ekonomi, sosial dan budaya (Rivai Notanubun, 2017). *Waterfront city* mengembangkan konsep pengelolaan wilayah yang didalamnya menampung berbagai macam kegiatan masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan tepi air, dimana bentuk pembangunannya berorientasi kearah perairan.

Pembangunan *waterfront city* harus disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan kawasannya, baik secara fisik maupun non fisik. Kawasan *waterfront* merupakan pertemuan antara daratan dan perairan, yang sering terjadi erosi/abrasi serta pendangkalan akibat sedimen yang berlebih. Secara hidrologi, kawasan *waterfront* merupakan daerah pasang surut yang rawan akan banjir. Sehingga, perlu dibuat struktur perlindungan tepi air terutama bila dilakukan reklamasi. Secara tata guna lahan, kawasan tersebut mempunyai hubungan yang erat antara perairan dan elemen-elemen yang ada di perkotaan. Secara ekonomi dan sosial budaya, *waterfront* memiliki keunggulan dibandingkan kawasan lain yaitu mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tempat pariwisata dan konservasi lingkungan.

Pembangunan *waterfront city* dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat. Prabudiantoro (1997) memaparkan 5 syarat umum yang harus dipenuhi untuk merancang

waterfront city, antara lain (Prameswari, 2018):

1. Lokasinya berada di tepi wilayah perairan yang besar
2. Terdapat area pemukiman, perdagangan, pelabuhan, serta pariwisata
3. Fungsi utamanya sebagai kawasan wisata, pemukiman, industri dan pelabuhan
4. Pembangunan berorientasi ke arah perairan
5. Pembangunan dilakukan ke arah vertical horizontal

Menurut Breen dan Rigby (1996), *waterfront city* diklasifikasikan menjadi 2, berdasarkan tipe pembangunan dan berdasarkan fungsinya (Rivai Notanubun, 2017). Berdasarkan tipe pembangunannya, *waterfront* dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Conservation* yaitu penataan dan pemeliharaan kawasan bersejarah agar tetap bisa dinikmati masyarakat
2. *Redevelopment* yaitu memanfaatkan kembali fungsi awal *waterfront* lama, dengan merekonstruksi dan merevitalisasi fasilitas-fasilitas yang telah ada untuk kepentingan khalayak umum.
3. *Development* yaitu menciptakan *waterfront* (merekamasi pantai) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan *waterfront* berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu:

1. *Mixed-used Waterfront*, yaitu mengkombinasikan pemanfaatan ruang *waterfront*.
2. *Recreational Waterfront*, yaitu sebagai penyedia sarana rekreasi (taman, area bermain, objek wisata)
3. *Residential Waterfront*, yaitu sebagai kawasan tinggal/pemukiman.
4. *Working Waterfront*, yaitu sebagai tempat aktivitas industri.

Nicholas Falk menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip penataan suatu *waterfront*. Pertama, adanya daya tarik berupa keunikan dan desain penataan area. Daya tarik tersebut kemudian mampu dimanfaatkan untuk memanjakan mata para pengunjung serta memberikan kesan yang berbeda dari tempat lain. Kedua, adanya integrasi wilayah, dimana didalamnya terdapat akses untuk pejalan kaki dan kendaraan. Ketersediaan kedua akses ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta mampu menjangkau keseluruhan area dengan leluasa. Ketiga, penataan kawasan tepian air harus mampu menciptakan beragam kegiatan (Wiriantari, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mana peneliti sebagai instrument kunci dari teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) menganalisa data dan hasil penelitian bersifat kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan dan menjawab permasalahan yang akan diteliti

secara lebih rinci dan mendalam. Dalam hal ini, arah penataan dan pengembangan konsep *waterfront city* pada kawasan objek wisata Pantai Soge dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan fakta yang ditemukan secara teoritis dan berdasarkan perspektif penulis.

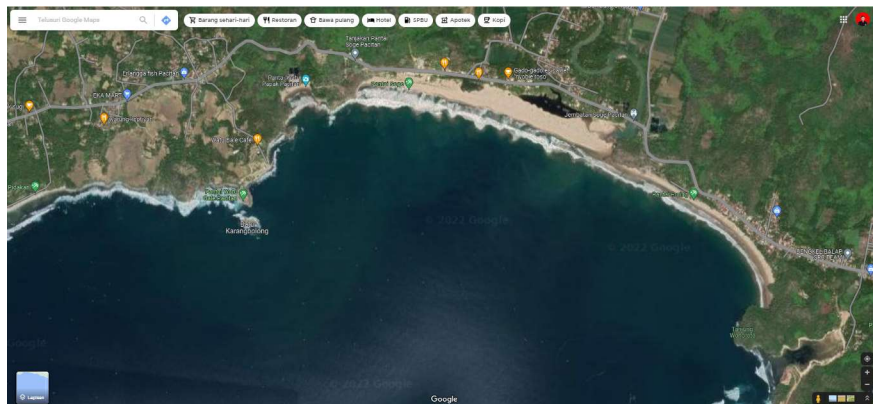
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dan sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder yang digunakan bersifat kualitatif yang bersumber dari beberapa jurnal ilmiah mengenai konsep *waterfront city* yang telah dipublikasikan secara elektronik sebelumnya, kemudian menyeleksi data-data yang relevan dan dirasa valid. Tidak hanya jurnal ilmiah, penulis juga menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah terkait melalui website resmi, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, memahami serta menganalisis dokumen-dokumen yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut berisi data-data mengenai implementasi konsep *waterfront city* di berbagai tempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik Objek Wisata Pantai Soge

Pantai Soge merupakan salah satu pantai di Kabupaten Pacitan yang berada tepat di pinggir Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Total luas kawasan pantai mencapai 15, 643 ha. Karakteristik dataran di sekitar kawasan Pantai Soge memiliki ketinggian wilayah antara 0-300 meter di atas permukaan air laut (Mdpl). Dataran di kawasan ini merupakan delta Sungai Soge yang terbentuk akibat proses sedimentasi selama bertahun-tahun. Pantai Soge memiliki garis pantai yang panjang dengan tipe pasir putih lembut dan bentuk pantai yang landau. Tipe pantai landai biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bersantai menikmati sunrise dan sunset di pagi dan sore hari. Ombak di pantai ini tergolong jenis ombak sedang hingga besar dengan ketinggian muka air laut yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan muka air laut sangat berpengaruh dengan perubahan kondisi fisik pantai, terutama terhadap kedalaman air. Semakin dalam perairan pantai maka kekuatan gelombang yang menghempas ke pantai juga semakin besar. Semakin besar gelombang menyebabkan kecenderungan pantai mengalami abrasi semakin tinggi.



Gambar 1. Peta Satelit Pantai Soge

Sumber: (Google Maps, 2022)



Gambar 2. *Landscap Pantai Soge*

Sumber: (Rizki A Tiara, n.d.)

Di bagian timur pantai, terdapat danau kecil yang terbentuk akibat adanya gundukan pasir pada area muara sungai. Gundukan ini menyebabkan air tidak dapat keluar sehingga terbentuklah danau payau tersebut. Di bagian barat terdapat area pepohonan cemara dan kelapa yang memberikan kesan asri dan alami. Sedangkan di bagian utara terdapat pemukiman, pertokoan, resort dan penginapan, serta kawasan tambak udang. Pantai Soge juga terkenal akan jembatannya yang sangat *iconic* yaitu Jembatan Soge. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 50 m dan sering dikenal *Sidney Harbour Bridge* Pacitan karena memiliki ciri khas rangka baja melengkung (Medigo, 2021). Fasilitas yang ada di sekitar Pantai Soge diantaranya area parkir kendaraan, warung-warung makanan dan minuman dan kamar mandi umum.



Gambar 3. *Danau Payau Pantai Soge*

Sumber: (Pantai Soge, n.d.)



Gambar 3. Jembatan Pantai Soge Sumber: (Pantai Soge, n.d.)

Pendekatan Pengembangan Objek Wisata Pantai Soge

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan objek wisata Pantai Soge dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu pendekatan terintegrasi adalah jenis pendekatan dengan sistem yang terintegrasi tidak hanya pada rencana pengembangan objek wisata Pantai Soge saja, namun juga terintegrasi dengan pembangunan perekonomian secara makro khususnya di Kabupaten Pacitan. Pada pendekatan terintegrasi, penyelesaian masalah objek wisata tidak hanya diselesaikan pada sektor pariwisata saja, tapi juga didasarkan pada dokumen perencanaan antar sektor pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan dari koordinasi dan sinkronisasi antar sektor satu dengan sektor lainnya. Kedua, yaitu pendekatan partisipasi masyarakat, dimana pada pendekatan ini masyarakat harus terlibat dalam tahap penataan objek wisata Pantai Soge. Prinsip dasar partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penataan objek wisata antara lain (Conoras, 2016) :

1. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait objek wisata Pantai Soge. Khususnya masyarakat sekitar pantai mempunyai hak sebagai *stakeholder* dalam pengembangan dan penataan objek wisata. Selain itu, masyarakat juga wajib menerima pendapatan atau keuntungan dari aktivitas pariwisata di Pantai Soge.
2. Pengembangan dan penataan objek wisata Pantai Soge harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk terus menjaga keberlangsungan sumber daya agar tetap ada di masa mendatang. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan penataan objek wisata akan berdampak pada keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga aspek keberlanjutan dapat terwujud.

Arah Penataan Ruang Objek Wisata Pantai Soge Berdasarkan Konsep Waterfront City

Suatu objek wisata pasti memiliki ciri khusus, baik dalam hal bentuk, lokasi dan karakteristik yang akan berdampak terhadap penggunaan lahan, fungsi, dan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya rancangan penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Arah penataan ruang bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang rapi dan terstruktur sehingga mampu

menciptakan daya tarik tambahan bagi objek wisata. Berdasarkan RDTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2036, kawasan *waterfront* diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata dan kelautan yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa, sarana prasarana umum, dan pemukiman (*Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016*, 2016). Arah penataan kawasan *waterfront* meliputi (Shirvani dalam Firmansyah, 2014):

1. Tata guna lahan (*land use*) dan tata bangunan (*building form and massing*)

Tata guna lahan merupakan gambaran/peta penataan lahan perkotaan. Kebijakan tata guna lahan pada *waterfront city* bertujuan untuk memaksimalkan potensi lahan kawasan secara efektif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk tata bangunan merupakan penataan komposisi bangunan meliputi ketinggiannya, koefisien lantai, garis sempadan, material bangunan dan lain-lain. Tata bangunan akan berdampak pada kualitas bangunan dan lingkungan. Semakin baik kualitas tata bangunan kawasan *waterfront* maka semakin baik pula kualitas bangunan dan lingkungannya. Perencanaan tata guna lahan dan bangunan di Pantai Soge perlu dirancang sesuai lokasi dan fungsi tersebut. Seperti kawasan ekonomi dan perdagangan sebisa mungkin ditempatkan pada lokasi dekat area parkir pengunjung dan jauh dari bibir pantai. Berdasarkan peraturan, sempadan pantai merupakan zona perlindungan setempat dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimum 100 m dari titik pasang tertinggi (*Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016*, 2016).

2. Sirkulasi dan parkir (*circulation dan parking*)

Sirkulasi dan parkir adalah elemen penting dalam penataan kawasan. Sirkulasi dan parkir secara langsung akan membentuk pola aktivitas kawasan. Sirkulasi yang dimaksud dalam hal ini meliputi jalan utama kawasan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda serta unsur-unsur penghubung lainnya.

3. Ruang terbuka (*open space*) dan jalur pedestrian (*pedestrian ways*)

Penataan ruang terbuka bertujuan untuk menggabungkan antara aktivitas manusia dan lingkungan. Sedangkan untuk jalur pedestrian bertujuan untuk memudahkan mobilitas dan menciptakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Penataan ruang terbuka yaitu berupa taman dan lahan camping pengunjung.

4. Aktivitas pendukung (*activity support*)

Aktivitas pendukung yaitu kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung interaksi pada kawasan. Aktivitas pendukung ini dapat disesuaikan dengan kondisi fisik dan non fisik kawasan. Dalam konsep *waterfront* aktivitas pendukung harus berorientasi pada perairan seperti kegiatan olah raga air. Dapat pula berupa aktivitas budaya seperti upacara adat, pertunjukan seni dan kearifan local lainnya.

5. Penandaan (*signage*)

Penandaan bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengenali kawasan.

Penandaan dapat berupa peta lokasi, penunjuk jalan, papan informasi dan lainnya.

6. *Preservasi (preservation)* dan *konservasi (conservation)*

Preservasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kawasan tempat tinggal dan kelestarian bangunan sejarah tanpa merubahnya, sedangkan konservasi adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar walaupun mengalami perubahan fungsi. Upaya preservasi di kawasan Pantai Soge dapat berupa pembebasan lahan yang digunakan sebagai gubuk pedagang untuk dialihfungsikan sebagai kawasan terbuka, pembebasan lahan di area Sungai Soge yang difungsikan sebagai untuk zona hijau serta pembebasan lahan area tambak untuk dialihfungsikan sebagai area parkir dan perdagangan. Sedangkan untuk upaya konservasi dapat berupa mengembaikan fungsi pepohonan cemara sebagai zona hijau. Selain itu, dapat juga dengan pembuatan dermaga kecil sebagai tempat bersandar perahu.

Arah Pengembangan Objek Wisata Pantai Soge Berdasarkan Konsep *Waterfront City*

Pengembangan Pantai Soge sebagai *Waterfront City* diarahkan sesuai fungsi awalnya sebagai *Recreational Waterfront*. Adapun luas pengembangan objek wisata di Kabupaten Pacitan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara reguler sebagai bangunan sarana dan prasarana pariwisata dibatasi maksimum 40% dan ruang terbuka hijau minimum 10% dari luas keseluruhan area serta dilengkapi fasilitas parkir yang memadai. Dalam prosesnya, harus memperhatikan aspek keindahan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan (*Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016*, 2016). Arah pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Infrastruktur dan Arsitektur*

Waterfront memiliki karakteristik yang multi fungsi dan *open access*, tetapi sangat rentan akan kerusakan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan penguatan dan penataan infrastruktur dasar seperti jalan utama objek wisata, saluran air dan limbah, tempat pembuangan sampah, tanggul pencegah banjir/pasang, serta ROB. Berkaitan dengan arsitektur, pengembangan objek wisata dengan konsep *waterfront city* harus mampu menciptakan wajah kawasan yang memiliki nilai estetika dan kenyamanan. Nilai estetika dan kenyamanan tersebut dititikberatkan pada bentuk kawasan, norma (aturan masyarakat setempat), zonasi (integrasi antara aktivitas darat dan air), tampilan (*image* kawasan dari segi budaya dan historis) dan tata masa (pengelompokan orientasi kegiatan pariwisata) (Conoras, 2016).

Pada objek wisata Pantai Soge, dapat dibagi menjadi 2 zonasi yaitu:

- a. Zona 1 yakni berada di wilayah darat yang di dalamnya meliputi: area parkir, taman/ruang terbuka hijau, area wisata kuliner, area perbelanjaan (cideramata), panggung pertunjukan, resort dan penginapan, café dan masjid.
- b. Zona 2 yakni berada di wilayah perairan yang didalamnya meliputi area olah raga air (canoing dan surfing) dan area susur sungai.

2. Fasilitas

Fasilitas yang dikembangkan dalam konsep *waterfront* terbagi menjadi dua yaitu fasilitas interpretasi dan fasilitas pendukung *waterfront*. Fasilitas interpretasi adalah fasilitas yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada wisatawan terkait *waterfront city*. Fasilitas interpretasi yang perlu dikembangkan antara lain papan penunjuk arah, peta kawasan, dan bangunan informasi lainnya. Sedangkan fasilitas pendukung *waterfront* adalah fasilitas yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu, fasilitas penunjang wajib mempertimbangkan komponen-komponen ekosistem guna menjaga dan meningkatkan kualitas ekosistem tersebut. Fasilitas pendukung tersebut antara lain panggung pertunjukan, gazebo, zona camping, taman, jalur pejalan kaki, fasilitas olahraga air, perahu/canoe, dan fasilitas transportasi wisata lainnya. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan pengunjung saat mengunjungi kawasan *waterfront*.

3. Aktivitas Wisata

Aktivitas yang dikembangkan dalam konsep *waterfront city* harus mengacu pada jenis objek wisata dan daya tarik wisata yang dimiliki serta senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutan. Aktivitas yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, disesuaikan dengan aktivitas budaya maupun non budaya yang dimiliki masyarakat sekitar Pantai Soge. Aktivitas budaya antara lain Upacara Jangkrik Genggong, Tradisi Eret, Kethek Ogleng, tari-taria dan pencak silat. Sedangkan untuk aktivitas non budaya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara wilayah darat dan wilayah laut seperti berkuda, ATV, susur sungai, canoing, surfing, wisata perahu dan olahraga air lainnya.

KESIMPULAN

Pantai Soge memiliki karakteristik dataran dengan rata-rata ketinggian wilayah antara 0-300 meter diatas permukaan air laut. Dataran terbentuk akibat proses sedimentasi selama bertahun-tahun. Ombak di Pantai Soge tergolong jenis ombak sedang hingga besar dengan ketinggian muka air laut yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penataan dan pengembangan konsep *waterfront city* pada objek wisata Pantai Soge yaitu pendekatan terintegrasi dan pendekatan partisipasi masyarakat. Penataan ruang diarahkan pada tata guna lahan dan bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka,

jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, penandaan serta preservasi dan konservasi. Sedangkan untuk pengembangan diarahkan pada infrastruktur, arsitektur, fasilitas dan aktivitas wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Andrasmo, D. (2018). Peran Waterfront City Pada Industri Pariwisata Taman Alun Kapuas Kota Pontianak. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v3i1.1709>
- Conoras, M. A. M. (2016). Penerapan Prinsip Waterfront City Pada Objek Wisata Pantai Ake Sahu Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Archipelandscape*, III(2), 11–17.
- Firmansyah. (2014). Arahan Penataan Kawasan Waterfront City Sambas. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, Vol. 14 No. 1.
- Google Maps. (2022). <https://www.google.com/maps/@-7.3180914,112.7271303,15z>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2008). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2008*. 1–20.
- Medigo, Y. (2021). *10 Foto Pantai Soge Pacitan 2022 Harga Tiket Masuk Lokasi*. <https://jejapiknik.com/pantai-soge/>
- Munandar, M. W. A. (2013). Evaluasi Konsep Design Banten Waterfront City Kecamatan Kasemen. *Planesa*, 4(02), 212965. <https://media.neliti.com/media/publications/212965-evaluasi-konsep-design-banten-waterfront.pdf>
- Pantai Soge. (n.d.). Retrieved June 22, 2022, from <https://www.pantainesia.com/pantai-soge>
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan 2016-2036. (2016).
- PP No. 47 Tahun 1997. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHChWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Prameswari, Y. P. (2018). *Waterfront City Development*. 3(1), 51–72. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3233>
- Rivai Notanubun, and M. M. (2017). Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Ambon. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(2), 243–255. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/15836>
- Rizki A Tiara. (n.d.). *5 Pantai Tersembunyi di Pacitan, Wajib Dikunjungi Sekali Seumur Hidup - Tribunnews.com Mobile*. Retrieved June 22, 2022, from <https://m.tribunnews.com/travel/2018/12/13/5-pantai-tersembunyi-di-pacitan-wajib->

dikunjungi-sekali-seumur-hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (2009).

<https://doi.org/10.1038/132817a0>

Wiriantari, F. (2021). Penataan Danau Buyan Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Vastuwidya, Vol. 4 No. 2.*